

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA

WANDA NURUL WAHIDA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

WANDA NURUL WAHIDA

A011201101



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

WANDA NURUL WAHIDA
A011201101

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Makassar, 05 Maret 2024

Pembimbing Utama



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004

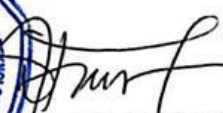
Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir, SE.,M.Si.CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE.,M.Si.CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

WANDA NURUL WAHIDA
A011201101

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 5 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D.	Ketua	1. 
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	3. 
4.	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®.	Anggota	4. 



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wanda Nurul Wahida

NIM : A011201101

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Indonesia”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Wanda Nurul Wahida
Wanda Nurul Wahida

PRAKATA

Alhamdulillah, puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Indonesia”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa manusia dari alam gelap gulita menuju terang benderang, dari lembah kejahiliyaan menuju puncak kejayaan Islam.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang amat mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam setiap proses penyusunan hingga pada perampungan skripsi ini. Dengan penuh penghormatan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada:

1. Keluarga dan kedua orang tua penulis, yang senantiasa menjadi tokoh inspirasi dan motivator utama untuk penulis, menjadi pihak yang tiada hentinya memberikan perhatian, dukungan, kasih sayang, nasihat, serta doa yang selalu melangit sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga surga menjadi balasan atas segala yang telah mereka berikan, aamiin.
2. Dosen pembimbing, Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D. dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pemikiran dalam memberikan masukan, arahan, dan motivasi pada penulis dari awal hingga tahap penyelesaian skripsi. Serta kepada Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® dan Ibu Dr.

Retno Fitrianti SE., M.Si., CWM® selaku penguji atas segala kritik, saran dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, serta kelancaran segala urusannya, aamiin.

3. Penasihat akademik, Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D. atas segala nasihat dan dampingannya dari awal perkuliahan hingga akhir studi dari penulis. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, serta kelancaran segala urusannya, aamiin.
4. Sahabat-sahabat penulis, Zahra, Deby, Alfiah, Sudirman, Putri Sabrina, Rosmila, Nur Aprilia Nur, Ahmad Shadiq, Egy, dan Ahernov, yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis untuk mencurahkan isi hati baik suka maupun duka, memberikan semangat maupun dukungan yang tidak terhitung jumlahnya, dan selalu menerima penulis dengan baik dan menjadi keluarga di tempat rantauan. Semoga segala urusannya dimudahkan dan sukses kedepannya, aamiin.
5. Sahabat-sahabat penulis, Ikkal, Afnan, Faisal, yang selama penyusunan skripsi selalu siap sedia menjadi teman jalan penulis. Semoga tidak lupa ngumpul-ngumpulnya dan sukses kedepannya, aamiin.
6. Sahabat-sahabat KKNT-110 ITTG Bantaeng terkhusus pokso 4, yang tidak henti-hentinya memberikan sumbangsih semangat dan menjadi moodboster dramatis kepada penulis. Semoga sukses kedepannya, aamiin.
7. Sahabat maupun rekan magang PLN UID SULSELRABAR, atas sumbangsih semangat, pengalaman dan inspirasinya selama menyelesaikan proses magang dan penyusunan skripsi penulis. Semoga segala urusannya dimudahkan dan sukses kedepannya, aamiin.

8. Pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan urusan serta melimpahkan keberkahan-nya pada kita semua, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka kesalahan tersebut sepenuhnya bersumber dari penulis. Oleh karena itu, segala saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat di harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 26 Januari 2024

Wanda Nurul Wahida

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Indonesia

Wanda Nurul Wahida
Muhammad Yusri Zamhuri
Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia, dengan mengidentifikasi dampak yang diberikan berbagai faktor yaitu dana desa dan alokasi dana desa sebagai variabel independen, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 yang meliputi 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini mengembangkan model regresi berganda pada data panel dengan menggunakan estimasi *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan di Indonesia, sementara transfer dana desa berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan, yang mana penurunan kemiskinan dapat dijelaskan oleh peningkatan dana desa selama periode tersebut. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan koefisien tertinggi, sementara yang terendah ditunjukkan oleh Provinsi Bali. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa untuk mendorong pembangunan desa, dibutuhkan keterlibatan dan peran semua pihak terkait baik dalam perumusan kebijakan, desain program, implementasi, serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Dibutuhkan pemerataan alih-alih peningkatan pada pertumbuhan PDRB, dan pemrioritasan dalam penggunaan dana pada program-program yang mampu meningkatkan mutu layanan publik dan kualitas sumber daya masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), PDRB

ABSTRACT

An Analysis of the Effect of Village Funds on Reducing the Rural Poverty Rate in Indonesia

Wanda Nurul Wahida
Muhammad Yusri Zamhuri
Sabir

This study aims to analyze the effect of village funds on rural poverty levels in Indonesia, by identifying the impact of various factors, namely village funds and village fund allocations as independent variables, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) as a control variable. The type of research is descriptive research, where this research uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) from 2016 to 2022 covering 33 provinces in Indonesia. This research develops multiple regression models on panel data using fixed effect model estimation. The results show that Village Fund Allocation (VFA) and GRDP do not affect rural poverty in Indonesia. At the same time, village fund transfers have a negative effect on poverty, where the decline in poverty can be explained by the increase in village funds over the period. Bengkulu Province is the province with the highest coefficient, while the lowest is shown by Bali Province. The results indicate that promoting village development requires the involvement and role of all relevant parties in policy formulation, program design, implementation, and integrated monitoring and evaluation. It requires equity rather than an increase in GRDP growth, and prioritization in the use of funds on programs that are suitable for rural development.

Keywords: Poverty, Village Fund, Village Fund Allocation (VFA), GRDP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teoritis	10
2.1.1. Kemiskinan	10
2.1.2. <i>Intergovernmental Transfers</i>	13
2.1.3. Dana Desa	16
2.1.4. Alokasi Dana Desa.....	18
2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.2. Hubungan antar Variabel.....	23
2.2.1. Hubungan antara Dana Desa dan Kemiskinan.....	23

2.2.2. Hubungan antara Alokasi dana Desa dan Kemiskinan	25
2.2.3. Hubungan antara PDRB dan Kemiskinan.....	26
2.3. Tinjauan Empiris.....	27
2.4. Kerangka Konseptual	30
2.5. Hipotesis Penelitian	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Jenis Data	34
3.4. Metode Pengumpulan Data	35
3.5. Metode Analisis Data.....	35
3.6. Model Estimasi Data Panel.....	36
3.7. Pengujian Hipotesis.....	40
3.8. Definisi Operasional Variabel.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Indonesia.....	43
4.2. Perkembangan Variabel Penelitian.....	45
4.2.1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia.....	45
4.2.2. Perkembangan Dana Desa di Indonesia	47
4.2.3. Perkembangan Alokasi Dana Desa di Indonesia.....	49
4.2.4. Perkembangan PDRB di Indonesia	52
4.3. Analisis Model dan Hasil Estimasi	55
4.3.1. Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	55
4.3.2. Hasil Estimasi.....	57
4.4. Pembahasan.....	61

4.4.1. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia	61
4.4.2. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia.....	63
4.4.3. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia	65
4.4.4. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan PDRB terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia.....	67

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Uji Chow	56
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji Hausman	57
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan PDRB terhadap Kemiskinan Perdesaan di Indonesia	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	3
Gambar 1.2 Perkembangan Dana Desa di Indonesia	6
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	30
Gambar 4.1 Persentase Kemiskinan Menurut Wilayah Perdesaan dan Provinsi di Indonesia	46
Gambar 4.2 Perkembangan Dana Desa Menurut Provinsi di Indonesia....	48
Gambar 4.3 Perkembangan Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi di Indonesia	50
Gambar 4.4 Perkembangan Alokasi Dana Desa dengan Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Indonesia	51
Gambar 4.5 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha	52
Gambar 4.6 Perkembangan PDRB Menurut Provinsi di Indonesia	53
Gambar 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Perdesaan Indonesia	54
Gambar 4.8 Ringkasan Hasil Estimasi Model	61
Gambar 4.9 Perbandingan Konstanta Unit <i>Cross Section</i>	67

BAB I

PENDAHULUAN

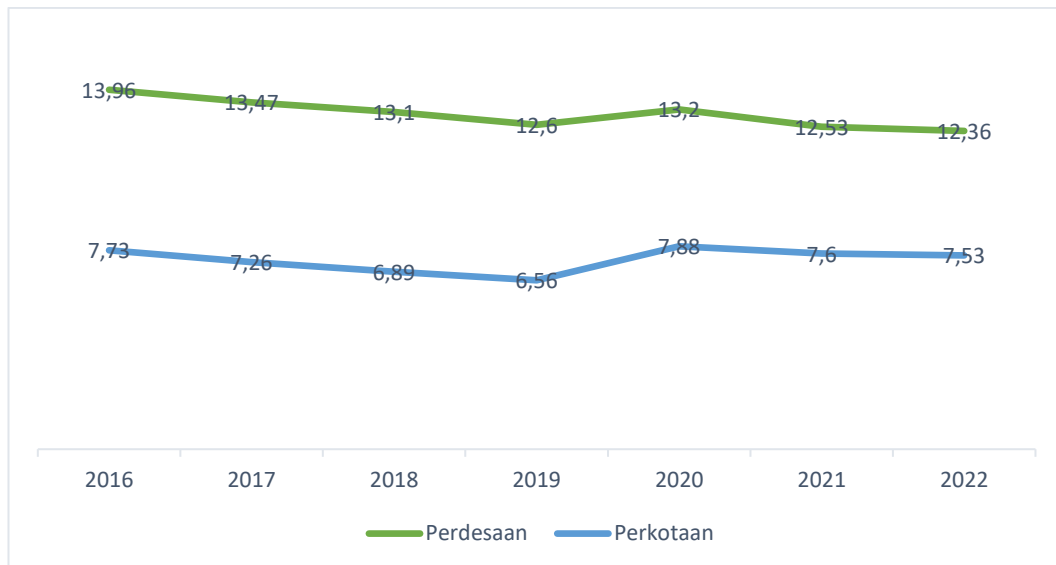
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan tergolong dua masalah penting yang masih menjadi isu hangat dalam masalah perekonomian nasional. Pembangunan nasional secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah masih menghadapi berbagai kondisi yang tidak ideal sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu kondisi tidak ideal tersebut adalah kemiskinan yang masih relatif tinggi di berbagai daerah. Di Indonesia sendiri, kemiskinan pada umumnya merupakan fenomena yang sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi di desa. Meski pemerintah telah meluncurkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, namun program-program tersebut tampaknya belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi. Pertumbuhan kinerja ekonomi di beberapa daerah, meskipun dianggap memiliki pertumbuhan yang tinggi, namun kurang berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan ini. Terlepas dari fakta tersebut, pertumbuhan ekonomi secara umum merupakan kontributor utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dengan asumsi ekonomi yang tumbuh mengindikasikan pendapatan perkapita yang meningkat.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menurun secara berkala, rasio gini nasional tercatat 0,391 pada 2018 dan menurun sebesar 0,381 pada 2022. Meskipun tingkat ketimpangan nasional menurun, tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi bervariasi. Dalam lima tahun, 17 provinsi mengalami peningkatan tingkat ketimpangan, sementara 15 provinsi lainnya mengalami

penurunan ketimpangan. Selain itu, mayoritas penduduk memiliki aset kurang dari US\$10.000, sementara hanya 0,1% penduduk yang memiliki aset sebesar US\$1 juta di Indonesia sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan nasional menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan perlu diatasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah ketimpangan di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia sangat terlihat jelas, dimana bagian barat Indonesia menyumbang 80% dari perekonomian nasional sementara bagian timur Indonesia hanya menyumbang sisanya. Selain itu, kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan cenderung melebar, yang juga menggambarkan kurangnya pembangunan di desa-desa. Ketimpangan antar wilayah di Indonesia ini selanjutnya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagai akibat ketidakseimbangan sumber daya alam dan faktor produksi (Lessmann & Steinkrauss, 2017).

Tingkat kemiskinan bergantung pada ketidakstabilan ekonomi makro, terutama pada tingkat harga (Afandi, dkk, 2017). Kondisi ini juga sejalan dengan temuan Yusuf dan Sumner (2015) bahwa terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di negara berkembang, manfaat dari pertumbuhan tersebut bagi masyarakat miskin masih terbatas, oleh karena itu diperlukan kombinasi kebijakan. Saat ini, sekitar 40% dari populasi Indonesia berada dalam batas garis kemiskinan nasional dengan pendapatan tidak lebih dari US\$2/hari. Ketika terjadi sedikit fluktuasi harga, penurunan pendapatan dan gangguan terhadap akses layanan publik, kelompok ini akan jatuh ke bawah garis kemiskinan.



Sumber: Data BPS, (diolah)

Gambar 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2016 – 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2022, sebanyak 26,36 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dapat diketahui dari Gambar 1.1 bahwa wilayah pedesaan selama ini telah menjadi penyumbang jumlah kemiskinan terbesar dari total penduduk miskin di Indonesia. Terakhir, pada September 2022, tingkat kemiskinan di perkotaan hanya sebesar 7,53 persen, jauh dibawah tingkat kemiskinan di pedesaan yang mencapai 12,36 persen. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kemiskinan pedesaan rata-rata hanya berkurang 0,29 persen setiap tahun. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan oleh terbatasnya produksi dan rendahnya aset produksi (Lessman & Steinkrauss, 2017). Selain itu, peningkatan angka kemiskinan di pedesaan yang lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan perkotaan dapat terjadi karena pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan pengurangan kemiskinan (Garza-Rodriguez, 2018). Masalah kemajuan sosial ekonomi di

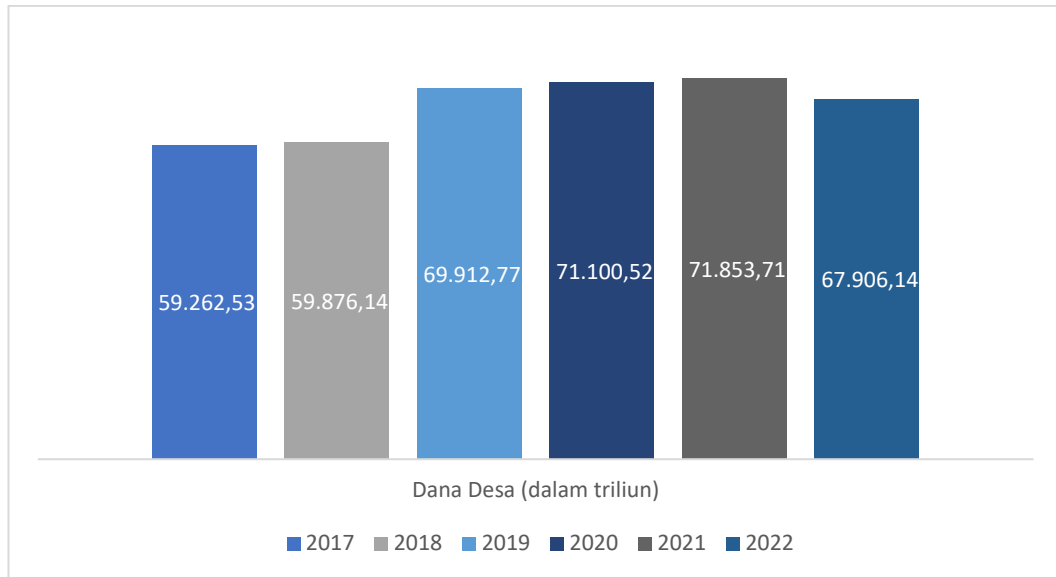
perdesaan menyebabkan ketimpangan yang lebih tinggi karena adanya struktur sosial yang hirarkis di perdesaan (Warda, dkk, 2019). Dalam masyarakat yang memiliki struktur hirarkis, manfaat program pembanunan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, oleh karena itu akses terhadap program pembangunan merupakan masalah utama (Sjaf Sofyan, 2023). Menurunnya tingkat pendapatan dan kualitas kesehatan rumah tangga pada masyarakat perdesaan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kemiskinan di tingkat individu (Antonelli & De Bonis, 2021; Visagie & Turok, 2021).

Tingginya angka kemiskinan di perdesaan juga mengindikasikan pengeluaran masyarakat perdesaan untuk memenuhi kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat perkotaan. Arham dan Naue (2015) mengemukakan terdapat berbagai dimensi yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di perdesaan, seperti rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan terbatasnya informasi untuk mengakses pengetahuan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya kualitas dan asupan gizi pada anak-anak miskin yang berdampak pada perkembangan otak mereka, terbatasnya kepemilikan lahan dan sumber daya produksi yang menyebabkan rendahnya pendapatan petani, dan struktur produksi ekonomi yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Melihat fakta bahwa kemiskinan di Indonesia identik dengan wilayah perdesaan, maka upaya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan dipandang sebagai prioritas utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional (Yahya & Agustina, 2022). Upaya pemerintah untuk terus mengurangi kemiskinan tidak terlepas dari berbagai kebijakan baik yang terkait ekonomi makro

maupun ekonomi mikro. Pada tataran ekonomi makro, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilisasi harga dan membuka lapangan kerja. Semenatar itu dengan tataran ekonomi mikro, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terus berupaya melakukan pembangunan di wilayah desa untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia, dengan harapan kesejahteraan di wilayah pedesaan yang semakin membaik dan angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Sejalan dengan hal itu, pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 6/2014 tentang Desa yang mengatur terkait Transfer Dana Desa sebagai bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia.

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai konsep pelimpahan sumber-sumber pendapatan dan fungsi-fungsi pengeluaran kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah (de Mello, 2020). Sistem desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menentukan barang publik dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol anggaran mereka (Rosen & Gayer, 2010). Desentralisasi telah memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah Indonesia (Baidhowah, 2022), mendorong pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan (Sandjaja, dkk., 2020), serta mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Fatoni, 2020). Dengan adanya anggaran tersebut, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pelatihan dan pemasaran hasil produksi masyarakat, pengembangan peternakan, pertanian atau perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, dan pendirian BUMDes.



Sumber: djpk.kemenkeu (diolah)

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Desa di Indonesia 2017 – 2022

Data diatas menunjukkan perkembangan transfer dana desa dalam 6 tahun terakhir, dimana transfer tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan jumlah realisasi transfer sebesar Rp. 71.853,71 T. Dana desa didistribusikan secara langsung kepada sekitar 50% penduduk yang tinggal di 74.093 desa pada tahun 2015, 74.754 desa pada tahun 2016, 74.954 desa pada tahun 2017, serta 74.953 desa pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, tercatat sejak tahun 2015 hingga 2020, dana desa telah membangun infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit).

Pengelolaan dana desa di Indonesia terkhusus di bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban masih dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti tahapan perencanaan pengelolaan dana desa yang belum melibatkan semua pihak, pembangunan infrastruktur seperti jalan yang masih berlubang, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal, dan pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan keluarga, lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan kegiatan lain yang sesuai kondisi desa. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho, dkk., (2022) yang mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa di Indonesia selama ini lebih banyak di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur, meskipun pada saat yang sama, dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan masih kurang. Studi mengenai korelasi antara transfer fiskal dan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun dengan implikasi yang berbeda-beda. Beberapa peneliti menemukan bahwa transfer fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Liu, dkk., 2017; Prawoto & Cahyani, 2020). Temuan yang berbeda terkait dampak transfer fiskal terhadap tingkat kemiskinan juga terlihat dari beberapa studi sebelumnya. Beberapa studi mencatat bahwa transfer fiskal dapat membantu memerangi kemiskinan (Enami, Lustig, dan Taqdiri, 2019). Studi lain juga menyiratkan bahwa transfer fiskal daerah meningkatkan tingkat kemiskinan (Suharyadi & Izzati, 2018).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Indonesia”**, dengan menyoroti pentingnya studi ini terletak pada tiga aspek. Pertama, studi ini akan menjawab temuan-temuan yang saling bertentangan mengenai dampak transfer fiskal terhadap tingkat kemiskinan. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat

di dunia dengan ketimpangan sumber daya alam yang cukup besar, sehingga menjadi bahan diskusi yang menarik terkait isu kemiskinan di perdesaan. Ketiga, penelitian yang secara spesifik berfokus pada transfer dana desa terhadap kemiskinan di perdesaan masih terbatas. Studi ini juga bermaksud untuk melihat sejauh mana transfer dana desa mempengaruhi tingkat kemiskinan perdesaan di 33 provinsi berbeda di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar pengaruh dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia?
2. Berapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia?
3. Berapa besar pengaruh PDRB terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis seberapa jauh pengaruh dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.
2. Menganalisis seberapa jauh pengaruh alokasi dana desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.
3. Menganalisis seberapa jauh pengaruh PDRB terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai dana desa dan kemiskinan perdesaan setiap provinsi di Indonesia
2. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan baik dari segi fiskal maupun moneter.
3. Manfaat terakhir adalah kiranya kajian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk melengkapi referensi yang sudah ada agar nantinya dapat memberikan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan dasar minimal (Maipita & Fitrawaty, 2014). Bank dunia (2004) secara operasional mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, sakit yang tidak mampu untuk berobat, ketiadaan akses ke sekolah dan ketidakmampuan membaca, tidak adanya pekerjaan dan kekhawatiran akan kehidupan di masa yang akan datang, sanitasi yang tidak memadai, serta ketidakberdayaan dan kebebasan dalam politik. Lebih lanjut, Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, perumahan, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) rasa aman dari ancaman atau perlakuan tindak kekerasan; (3) akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Bappenas, 2021).

Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri (Effendi, 1992). Kemiskinan terjadi bukan karena tidak memiliki komoditi tetapi karena masyarakat kurang mampu mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari komoditi tersebut (Todaro & Smith, 2015). Kemiskinan juga dapat

disebabkan karena rendahnya modal manusia, seperti pelatihan, pendidikan atau kemampuan membangun serta rendahnya modal fisik (Dowling & Valenzuela, 2010). Lebih lanjut, kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi miskin yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya perbandingan dengan pihak lain seperti penduduk yang telah memiliki penghasilan sudah mencapai kebutuhan dasar namun masih tergolong jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya (Todaro & Smith, 2015).

Setidaknya terdapat tiga aspek yang mendorong terjadinya kemiskinan antar wilayah, yaitu aspek rumah tangga, aspek masyarakat atau komunitas, dan aspek wilayah atau wilayah (Khandker & Haughton, 2009). Berdasarkan kapasitas rumah tangga, penduduk miskin dicirikan dengan mayoritas bekerja di sektor informal, khususnya sektor pertanian, memiliki pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan yang rendah, aset yang dimiliki pun tergolong sedikit, serta angka ketergantungan yang tinggi. Berdasarkan aspek komunitas, kemiskinan bisa dipengaruhi oleh kebudayaan, kebiasaan, adat-istiasat, serta agama yang ada di suatu wilayah. Dalam hal ini, lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin memiliki bias perspektif terhadap kemiskinan, yakni kondisi seseorang yang tidak memiliki daya juang untuk bangkit atau keluar dari lingkaran kemiskinan. Sedangkan berdasarkan kapasitas wilayah, tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam wilayah tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari wilayah lain disekitarnya seperti adanya perbedaan ketersediaan infrastruktur yang membuat aktivitas ekonomi antar wilayah berbeda pula.

Terdapat beberapa jenis pengukuran yang umumnya digunakan dalam mengukur kemiskinan, diantaranya:

a. Ukuran Badan Pusat Statistik

Badan pusat statistik mengukur kemiskinan dengan melihat dari ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Haughton dan Khandker, 2009). Penduduk miskin menurut pengukuran BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan dasar makanan dilihat dari 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, ikan, umbi-umbian, telur dan susu, sayuran, daging, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sementara itu, GKNM adalah kebutuhan minimum untuk sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Komoditi kebutuhan dasar non makanan dilihat dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Adapun sumber data utama yang digunakan untuk melihat garis kemiskinan makanan dan non-makanan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

b. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai hilangnya kesejahteraan. Hal ini diukur melalui kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi), atau dengan kata lain dapat dilihat melalui pendapatan/pengeluaran. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Bank

Dunia yaitu pendapatan/pengeluaran sebesar 2 US\$ per kapita per hari. Rumah tangga yang berpendapatan per kapita per hari kurang dari ketetapan tersebut maka termasuk dalam kategori miskin. Nominal tersebut setara dengan nilai Rp 952.680 per bulan dengan kurs 1 US\$ senilai Rp15. 878 (Sari 2020; Haughton dan Khandker 2009).

c. Indeks FGT (*Headcount Index*, *Poverty Gap Index* dan *Poverty Severity Index*)

Tingkat kemiskinan antar rumah tangga diukur menggunakan indeks FGT yang meliputi *headcount index*, *poverty gap index*, dan *poverty severity index*. *Headcount ratio* disimbolkan dengan P_0 merupakan ukuran persentase penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. *Poverty gap index* atau indeks kedalaman kemiskinan disimbolkan dengan P_1 yaitu ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. *Poverty severity index* atau indeks keparahan disimbolkan dengan P_2 kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Tinggi rendahnya P_2 mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin tersebut.

2.1.2. Intergovernmental Transfers

Intergovernmental transfers atau yang juga diketahui sebagai transfer antar pemerintah merupakan transfer dana dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan lainnya untuk suatu tujuan, yang mana dapat berkisar dari membiayai pengeluaran pemerintah secara umum hingga membiayai program atau proyek tertentu (Boadway & Shah, 2007). Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem

pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antar pusat dan daerah (Nemec & Wright, 1997). Tujuan utama dari implementasi transfer adalah untuk koreksi ketidakefisienan fiskal, menginternalisasikan eksternal fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan pemerataan fiskal antar daerah (Oates, 1999).

Transfer antar pemerintah dapat diklasifikasikan secara luas kedalam dua kategori (Boadway & Shah, 2007), yaitu:

a. General-Purpose Transfers

General-purpose transfers atau transfer untuk tujuan umum diberikan sebagai dukungan anggaran yang bersifat umum, dengan syarat dan ketentuan yang tidak mengikat. Transfer ini biasanya diamanatkan oleh undang-undang, namaun terkadang bersifat *ad hoc* atau diskresioner. Transfer jenis ini dimaksudkan untuk mendukung otonomi daerah dan meningkatkan kesetaraan antar yurisdiksi (Barati & Szalai, 2000).

b. Specific-Purpose Transfers

Specific-purpose atau transfer khusus, dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada pemerintah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Transfer ini dapat bersifat reguler atau wajib atau bersifat diskresioner atau *ad hoc*. Transfer khusus biasanya menentukan jenis pengeluaran yang dapat dibiayai (*input-based conditionality*). Jenis-jenis pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran modal, pengeluaran operasional, atau keduanya. Transfer khusus juga dapat mensyaratkan pencapaian hasil tertentu dalam penyediaan layanan (kondisionalitas berbasis output). Persyaratan berbasis input sering kali bersifat

intrusif dan tidak produktif, sedangkan persyaratan berbasis output dapat mendukung tujuan pemberi transfer sambil mempertahankan otonomi daerah.

(1) *Non-matching Transfers*

Transfer khusus yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*conditional non-matching transfer*) memberikan sejumlah dana tertentu tanpa adanya penyesuaian dengan pemerintah daerah, dengan syarat dana tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Transfer ini biasanya digunakan untuk mensubsidi kegiatan yang dianggap memiliki skala prioritas yang lebih tinggi oleh pemerintah pusat, namun memiliki skala prioritas rendah oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi jika sebuah program menghasilkan *spillovers* yang tinggi.

(2) *Matching Transfers*

Matching transfers merupakan transfer khusus yang mensyaratkan penggunaan dana untuk tujuan tertentu dimana pemerintah daerah harus menyesuaikan dana tersebut sampai pada tingkat tertentu. *Matching transfers* dapat memperbaiki inefisiensi dari *spillovers*, namun tidak mengatasi ketimpangan atau keterbatasan kapasitas fiskal baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah dengan sumber daya yang cukup, dapat memenuhi persyaratan yang sesuai dan memperoleh bantuan transfer dalam jumlah besar. Sebaliknya, pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas dan tidak dapat menyesuaikan dengan transfer dari pemerintah pusat sehingga tidak memperoleh banyak bantuan, meskipun kebutuhan pengeluaran antar daerah mungkin sama atau bahkan lebih besar (Shah, 1991).

2.1.3. Dana Desa

Dana desa merupakan dana transfer ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan pada daerah-daerah yang terpinggirkan dan kurang berkembang di Indonesia yang bertujuan untuk menutup kesenjangan yang tinggi dalam pelayanan publik antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah pedesaan (Sutiyono, dkk., 2018). Menurut Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan kebutuhan dasar, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Sebagai hasil dari implementasi UU Desa ini, desa memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan lokal. Dengan meningkatnya dukungan keuangan dari Dana Desa, tata Kelola dan ekonomi desa seharusnya juga meningkat (Permatasari, dkk, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/2016, anggaran dana desa untuk setiap kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus $VF = BA + AF$, dimana VF adalah dana desa, BA adalah alokasi dasar, dan AF adalah formula alokasi. Perhitungan masing-masing variabel dijelaskan secara rinci dalam peraturan tersebut.

Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan desa melalui skema pembiayaan yang diatur dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan melibatkan lembaga-lembaga desa untuk mengelola dana tersebut (Yusuf, dkk., 2019). Sejak diberlakukannya UU Desa, desa diberikan kesempatan yang sangat baik untuk mengelola administrasi dan tata Kelola pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

(Susilowati, dkk., 2018). Dana desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan desa (Hermawan, dkk., 2019).

Pemberian dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi roda perekonomian di tingkat desa. Program dana desa atau sejenisnya telah memberikan kontribusi di berbagai negara, antara lain: (1) Meningkatkan jumlah infrastruktur, misalnya melalui program Dana Desa di Indonesia, National Solidarity Programme (NSP) di Afganistan, Social Investment Fund (SIF) di Bolivia; (2) Meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konsumsi, misalnya melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di India; (3) Mengurangi kemiskinan, misalnya melalui program Dana Desa di Indonesia; (4) Meningkatkan lapangan pekerjaan, misalnya melalui Common Agricultural Policy (CAP) di Swedia; (5) Meningkatkan akses terhadap keuangan; (6) Meningkatkan ekonomi dan partisipasi masyarakat, misalnya melalui Asosiasi Simpan Pinjam Desa (Village Savings and Loans Association/ VSLA) di Mesir dan program Dana Desa di Indonesia; (7) Meningkatkan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), misalnya melalui program Dana Desa di Indonesia; (8) Mengurangi prevalensi stunting, misalnya melalui program Dana Desa di Indonesia (Rachma, dkk., 2019).

Program dana desa juga memiliki tujuan tidak langsung yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui pembiayaan SDGs. Dana desa dialokasikan, antara lain untuk mendukung program infrastruktur desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan membangun fasilitas penting. Desain kebijakan dana desa di Indonesia serupa dengan kebijakan pembangunan desa lainnya yang di temukan di Afrika Selatan dan Amerika Serikat, dimana pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang didukung dengan bantuan keuangan dan teknis membantu memungkinkan pengembangan infastruktur dan ekosistem bisnis yang lebih baik.

2.1.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa atau ADD adalah bagian dari dana desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Hehamahua, 2015). Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana yang berasal dari desa yang diterima Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa disebut sebagai alokasi khusus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Merujuk pada hasil revisi UU No. 22 tahun 1999, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan atau berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan desa termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik desa, serta pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa dengan ditujukan untuk membiayai pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Alokasi dana desa merupakan stimulus untuk mengakselerasi perekonomian desa yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan

masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang dikelola langsung oleh desa dan masyarakat (Prasetyo, 2012). Kebijakan perbaikan infrastruktur dilakukan sebagai penyangga akses ekonomi dan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan padat karya yang digunakan sebagai dtimulus fiskal untuk mendorong perekonomian di tingkat desa (de Mello, 2000). Alokasi dana desa (ADD) akan mendorong pelaksanaan otonomi desa, serta upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan, pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat melaksanakan pembangunan desa. Pengalokasian dana desa yang difokuskan pada pembangunan masyarakat desa diharapkan dapat mendorong beberapa penanganan masalah yang dihadapi masyarakat desa secara mandiri tanpa harus menunggu lama datangnya program-program pemerintah daerah.

2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan putput per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 2012). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Hasyim, 2016). Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh peningkatan PNB potensial suatu negara, tidak hanya berhenti pada pertumbuhan output per kapita tetapi juga pertumbuhan upah rill dan peningkatan standar hidup masyarakat (Samuelson, 1996). Setidaknya terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting bagi setiap masyarakat, diantaranya adalah akumulasi modal yang meliputi semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja; pertumbuhan populasi penduduk

yang pada akhirnya akan meningkatkan angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja; dan kemajuan teknologi yang dapat mempermudah proses produksi dalam rangka efisiensi tenaga kerja (Todaro, 1994).

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Para ekonom klasik mendasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas dalam analisis pertumbuhan ekonomi dengan mengklasifikasikan empat faktor yang mempengaruhi ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Meski menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada banyak faktor, ekonom klasik menitikberatkan pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi klasik melihat hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi yang pada akhirnya akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Namun apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Berdasarkan hal tersebut, teori penduduk optimum dikemukakan untuk menjelaskan perkaitan diantara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori pertumbuhan klasik dapat

dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2004).

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-klasik

Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teknologi ini dari peningkatan skill atau kemampuan teknik, sehingga produktivitas kapital meningkat. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, proses peningkatan pertumbuhan perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi (Wiguna, 2013).

Selanjutnya, menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio* = COR) dapat berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, digunakan jumlah modal yang berbeda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka akan lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (AD) tetapi juga terhadap penawaran agregat (AS) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang ini investasi menambah stok kapital (K). Harrod-Domar dengan asumsi bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output yang dimaksud adalah output potensial yang bisa dihasilkan dengan stok kapital yang ada. Sedangkan output yang terealisasi belum tentu sama dengan output potensial, hal ini tergantung pada jumlah permintaan agregat. Investasi dianggap faktor penting karena memiliki dua peran sekaligus dalam mempengaruhi perekonomian,

pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan yang artinya investasi mempengaruhi sisi permintaan; kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran (Lincoln Arsyad, 2010).

2.2. Hubungan antar Variabel

2.2.1. Hubungan antara Dana Desa dan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama dari dana desa adalah untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan karena kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan. Hal lain yang menyertai dana desa adalah kewenangan untuk mengukur, mengurus, dan mengorganisir sumber daya desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat (Syafingit, dkk., 2020). Dana desa dimaksudkan sebagai salah satu instrumen fiskal yang diharapkan mampu menstimulasi pembangunan desa (Hermawan, dkk., 2019). Dengan adanya pendapatan asli desa dan dana desa, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan (Aziz, 2016). Pembangunan ini memiliki tiga tujuan pembangunan, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Azwardi dan sukanto (2014) juga menganalisis bahwa dana desa berkaitan dengan belanja daerah untuk Pembangunan desa. Bahkan dalam pemerintah desa, dana desa umumnya menjadi sumber utama pemerintah desa untuk mengatasi kemiskinan. Dana desa setidaknya dapat meningkatkan perekonomian desa yang diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan masyarakat seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Wanita Tani (KWT), (Bempah, 2013).

Mengacu pada Undang-Undang Pasal 78 tentang Desa, penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 yang mengatur bahwa desa memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penekanan pada (1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik sarana penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan dan permukiman; (2) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (3) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan budaya; (4) prasarana produksi dan distribusi; (5) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Jika semua daerah mengacu pada pengelolaan dana desa sesuai UU, maka akan berdampak langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Namun, dana desa tidak signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di pedesaan cenderung menurun setiap tahun, tetapi perubahan elastisitasnya lebih rendah setelah implementasi transfer dana desa (Arham & Hatu, 2020). Jumlah dana desa tidak berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan dikarenakan kurangnya pemerataan dan persepsi di beberapa sektor. Pembangunan sarana, prasarana, dan program pemberdayaan masyarakat desa saat ini semakin meningkat, namun distribusi dan pemanfaatan dana desa masih

jauh dari optimal. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta program pemberdayaan masyarakat saat ini mengalami peningkatan, namun dana desa masih memiliki masalah dalam hal pemerataan dan pemanfaatan dana tersebut (Imawan & Purwanto, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan Nguyen & Nguyen (2019) yang menekankan bahwa kurangnya modal dan kurangnya sarana produksi sebagai penyebab utama kemiskinan pada rumah tangga miskin. Hasil studi Saragi (2021) juga menunjukkan bahwa selama lima tahun, dana desa meningkat secara drastis. Selain itu, pertumbuhan ini disertai dengan sedikit penurunan angka kemiskinan.

2.2.2. Hubungan antara Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan

Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi/besarnya alokasi dana desa diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga terjadi penurunan tingkat kemiskinan (Susilowati & Hadi, 2018). Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan dengan sasaran akhir sebagai stimulus dalam mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di daerah perdesaan (Magal, dkk., 2021). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa, akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015).

Dengan meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah telah menetapkan beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya melalui

program dana desa dan alokasi dana desa. Semakin besar alokasi dana desa, maka Tingkat kemiskinan di prediksi akan semakin rendah (Martini, dkk., 2021). Peningkatan angka kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk memajukan pembangunan desa. Semakin besar pendapatan desa, maka kesejahteraan masyarakat desa diyakini akan terwujud dan kemiskinan di desa akan berkurang. Kesiskinan secara signifikan dipengaruhi oleh dana desa dan alokasi dana desa (Martini, dkk., 2021). Alokasi dana desa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah serta mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan produk domestik regional bruto di sektor pertanian (Prasetyanto, 2012). Penyaluran alokasi dana desa telah memberikan arah yang benar untuk meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah dengan mengurangi jumlah penduduk miskin. Hasil stimulasi kebijakan yang dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran alokasi dana desa mampu meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah, yaitu antara lain mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah. Peningkatan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan total pengeluaran daerah untuk mendorong peningkatan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah. Selanjutnya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan (Prasetyo, 2012).

2.2.3. Hubungan antara PDRB dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor pengurangan kemiskinan di suatu daerah. Parameter tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah ialah tingkat produk domestik regional bruto (PDRB), yang menjadi nilai bersih dari produk serta jasa akhir yang diwujudkan dengan bermacam kegiatan ekonomi

disuatu wilayah (Hadi Sasana, 2006). Semakin bertambah tinggi PDRB disuatu wilayah, maka semakin besar juga kapasitas sumber keterbukaan wilayah tersebut. Dalam kenyataannya, PDRB memiliki efek atas keseluruhan angkatan kerja yang masih bekerja menggunakan perkiraan bila nilai PDRB melonjak, maka total nilai tambah hasil pada semua sektor ekonomi disuatu daerah akan meningkat (Hasibuan, dkk., 2022). Meningkatnya PDRB menjelaskan pertumbuhan ekonomi meningkat, yang akan berdampak pada pembangunan di suatu wilayah menuju arah yang lebih baik sehingga kemudian berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan (Damanik & Sidauruk, 2020).

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang (Permana, 2012). Ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan mengurangi kemiskinan (Hermanto & Dwi, 2008). Penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia (Wongdesmiwati, 2009).

2.3. Tinjauan Empiris

Azhari, dkk, (2022), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan sedangkan BUMDes tidak

berpengaruh terhadap kemiskinan di seluruh desa di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan total 6.497 desa. Dalam hal ini, pemangku kepentingan terkait harus dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dana desa melalui program magang, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pengelola. Kerja sama antar pihak sangat dianjurkan dalam pemberdayaan BUMDes sebagai sumber pendapatan asli desa.

Yusuf & Khoirunurrofik (2022) mengidentifikasi program kegiatan dana desa yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi desa dan menentukan prioritas daerah dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan desa di bidang ekonomi melalui penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan pedoman prioritas penggunaan dana desa yang lebih berlaku. Lebih lanjut, pangsa belanja ekonomi di wilayah timur Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, namun trennya terus meningkat, sedangkan pangsa belanja ekonomi di pulau Jawa dan Bali menunjukkan angka yang lebih tinggi.

Briliani, dkk., (2021) dalam penelitiannya dengan menggunakan metode deskriptif mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, dana desa meningkat secara dramatis. Selain itu, pertumbuhan ini sejalan dengan sedikit penurunan angka kemiskinan. Ditemukan bahwa penurunan angka kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2019 adalah sekitar 15%. Status IDM untuk kabupaten/kota menunjukkan peningkatan status dari desa tertinggal di tahun 2015 menjadi desa berkembang di tahun 2019. Pulau Jawa merupakan wilayah yang berkontribusi dalam peningkatan status tersebut, baik dari desa tertinggal, berkembang, maupun mandiri. Sementara itu, wilayah Papua merupakan wilayah dengan desa tertinggal paling banyak.

Rina Oktavia (2020) menerapkan metode penelitian uji beda rata-rata, analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif pada penelitiannya untuk menganalisis dampak alokasi dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Kulon Progo. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pasca implementasi kebijakan dana desa. Sementara itu, hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa sebanyak 95 persen alokasi dana desa pada periode 2015-2017 digunakan untuk program pembangunan, sedangkan hasil analisis kualitatif mengidentifikasi adanya perbedaan pengelolaan dana desa di Desa Demangrejo dan Desa Kalirejo.

Arham & Hatu (2020) menginvestigasi dampak transfer fiskal, khususnya transfer dana desa terhadap ketimpangan pendapatan pedesaan dan kemiskinan pedesaan dalam penelitiannya. Penelitian ini mengembangkan model regresi berganda data panel 33 provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah pelaksanaan transfer dana desa. Hasilnya menunjukkan elastisitas ketimpangan pendapatan lebih tinggi setelah implementasi transfer dana desa. Kemiskinan di pedesaan cenderung menurun setiap tahunnya, namun perubahan elastisitasnya lebih rendah setelah implementasi transfer dana desa. Lebih lanjut, transfer dana desa tidak signifikan dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan.

Singgit & Kosasih (2020) melalui penelitiannya yang berfokus pada variabel ekonomi jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen dan dana desa sebagai variabel independen utama, juga alokasi dana desa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja modal sebagai variabel independen lainnya, menganalisis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan pada studi tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data

panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun berdasarkan hasil wawancara mendalam, minimal terdapat tiga aspek dari kebijakan dana desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan dana desa.

Arham & Payu (2019) dalam penelitiannya menyelidiki sejauh mana transfer dana desa telah efektif dan mempengaruhi kemiskinan perdesaan di Indonesia selama masa transfer. Dengan menggunakan metode ekonometrika melalui persamaan data panel pada tahun 2015-2016 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk dana desa dan Badan Pusat Statistik untuk ekonomi makro, menunjukkan bahwa transfer dana desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini berarti bahwa peningkatan Dana Desa secara konsisten mampu mengurangi kasus tersebut. Kebijakan ini telah memenuhi harapan karena kemiskinan di pedesaan mencapai tingkat yang tinggi selama bertahun-tahun.

2.4. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka dibentuklah kerangka konseptual. Kerangka konseptual menggambarkan keterkaitan antara teori-teori dan konsep yang mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian yang sistematis.

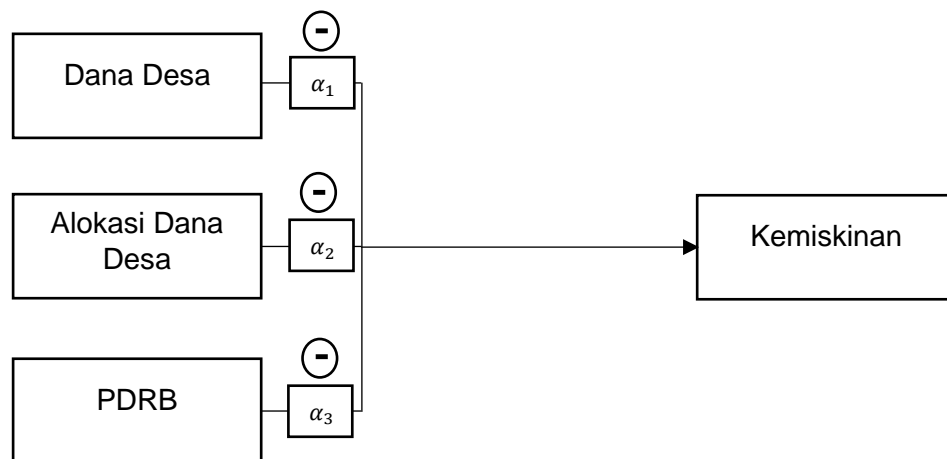
Program dana desa merupakan salah satu wujud desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimaksudkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merencanakan penggunaan dana desa dan membelanjakannya sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Dengan adanya anggaran tersebut, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pelatihan dan pemasaran hasil produksi masyarakat, pengembangan peternakan, pertanian maupun perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata dan pendirian BUMDes. Dengan menggunakan dana desa untuk perencanaan pembangunan desa seperti ini, masyarakat desa dapat meningkatkan perekonomian mereka dan mampu mengangkat diri mereka sendiri dari kemiskinan.

Alokasi dana desa adalah perolehan bagian dari keuangan yang bersumber dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa dan merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. Alokasi dana desa di perlukan karena kebijakannya sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana Desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ini relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa antara lain untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Selain itu juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa yang diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan di perdesaan.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka pembangunan daerah tersebut akan lebih baik yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena dengan tingginya PDRB suatu daerah, maka daerah tersebut dapat memperbaiki sarana dan prasarana daerahnya sehingga dapat menunjang perekonomiannya. Selain itu PDRB daerah yang tinggi juga akan membantu masyarakat yang menganggur melalui lapangan pekerjaan yang mampu diciptakan daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi daerahnya baik potensi alamnya, modal, dan sebagainya.

Berikut penyusunan kerangka konseptual yang skematis:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan tinjauan empiris, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dana desa berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.
2. Alokasi dana desa berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.
3. PDRB berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.